



DOMINASI FDI SINGAPURA DAN RIVALITAS STRUKTURAL DALAM RELASI EKONOMI INDONESIA-SINGAPURA DI BAWAH AEC

Rafli Zahran Siregar^{a*}, Mhd. Suhaidi^b, Fakhri Ahmad^c, Fasha Rahmadhani Syafitri^d, Laura Anna Lusia Manullang^e

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Jurusan Hubungan Internasional; raflyzahran@gmail.com, Universitas Riau; Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau 28293

^b Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Jurusan Hubungan Internasional; suhaidiadi82@gmail.com, Universitas Riau; Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau 28293

^c Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Jurusan Hubungan Internasional; fakhriahmad3110@gmail.com, Universitas Riau; Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau 28293

^d Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Jurusan Hubungan Internasional; fasharahmadhani@gmail.com, Universitas Riau ; Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau 28293

^e Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Jurusan Hubungan Internasional; lauramanullang70@gmail.com, Universitas Riau; Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau 28293

*Penulis Korespondensi: Rafli Zahran Siregar

ABSTRACT

This article examines the dynamics of the bilateral economic relations between Indonesia and Singapore within the framework of the ASEAN Economic Community (AEC), focusing on three main dimensions: the structural asymmetry of both countries' economic capacities, the pattern of Indonesia's dependence on Singapore's foreign direct investment (FDI), and the rivalry of interests operating beneath the surface of bilateral cooperation narratives. Employing a qualitative approach with a case study design and secondary data analysis covering the period 2015–2024, this article finds that the bilateral relationship is characterized by asymmetric interdependence that has deepened over the course of AEC implementation. Singapore's FDI dominance, growing from USD 5.9 billion in 2015 to USD 20,1 billion in 2024 and accounting for 52 percent of Indonesia's total FDI inflows, reflects a profound structural dependency. Rather than functioning as a mechanism for economic convergence, the AEC has reinforced pre-existing asymmetric investment patterns, as formal liberalization has not been accompanied by adequate redistributive mechanisms. This article argues that a transformation toward a more balanced relationship requires Indonesia to strengthen its domestic institutional capacity, diversify its sources of investment, and leverage its strategic assets more effectively in both bilateral and regional multilateral forums.

Keywords: *Asymmetric Interdependence; Investment Dependency; ASEAN Economic Community (AEC); Indonesia-Singapore*

Abstrak

Artikel ini mengkaji tiga dimensi utama relasi ekonomi bilateral Indonesia-Singapura dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu asimetri struktural kapasitas ekonomi kedua negara, ketergantungan investasi langsung asing (FDI) Indonesia terhadap Singapura, serta rivalitas kepentingan di balik narasi kerja sama bilateral. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan analisis data sekunder yang mencakup periode 2015–2024. Periode 2015–2024 dipilih karena mencakup seluruh rentang penerapan AEC sejak diberlakukan secara resmi hingga tahun tersedianya data terkini, sehingga memungkinkan analisis tren jangka menengah yang bermakna, artikel ini menemukan bahwa relasi kedua negara bersifat interdependensi asimetris yang semakin menguat seiring berjalannya AEC. Dominasi FDI Singapura yang tumbuh dari 5,9 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 20,1 miliar dolar AS pada 2024, dengan pangsa mencapai 52 persen dari total FDI Indonesia, mencerminkan

ketergantungan struktural yang mendalam. AEC, alih-alih berfungsi sebagai mekanisme konvergensi ekonomi, justru memperkuat pola investasi asimetris yang sudah ada karena liberalisasi formal tidak disertai mekanisme redistribusi yang memadai. Artikel ini berargumen bahwa transformasi menuju relasi yang lebih seimbang mensyaratkan penguatan kapasitas institusional domestik Indonesia, diversifikasi sumber investasi, dan pemanfaatan *leverage* strategis secara lebih efektif dalam forum bilateral maupun multilateral kawasan.

Kata Kunci: Interdependensi Asimetris; Ketergantungan Investasi; ASEAN Economic Community (AEC); Indonesia-Singapura

1. PENDAHULUAN

Indonesia dan Singapura merupakan dua negara anggota ASEAN yang memiliki posisi strategis namun berbeda secara fundamental dalam struktur ekonomi kawasan. Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara baik dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, maupun potensi sumber daya alam, menjadi magnet investasi bagi negara-negara mitra di kawasan. Di sisi lain, Singapura, meskipun hanya memiliki luas wilayah sekitar 733 km², telah berhasil memposisikan dirinya sebagai pusat keuangan, perdagangan, dan investasi terkemuka di Asia Tenggara [9]. Kesenjangan struktural antara keduanya menciptakan sebuah relasi ekonomi yang secara inheren bersifat asimetris, namun tetap saling bergantung satu sama lain.

Relasi ekonomi bilateral Indonesia-Singapura telah berlangsung selama puluhan tahun dan terus mengalami pendalaman yang signifikan. Hubungan bilateral kedua negara ditopang oleh kerja sama ekonomi yang kuat, di mana volume perdagangan bilateral mencapai 59 miliar dolar AS pada tahun 2019, dan Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia sejak tahun 2014 [11]. Dominasi Singapura sebagai sumber utama Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia bahkan terus berlanjut hingga saat ini, sejalan dengan temuan bahwa FDI merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Pada kuartal ketiga tahun 2024, Singapura tetap menjadi kontributor FDI terbesar di Indonesia dengan total investasi mencapai 3,8 miliar dolar AS, menyumbang 28,8 persen dari total realisasi FDI. Menteri Investasi Indonesia bahkan menegaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, Singapura secara konsisten menempati posisi teratas [23]. Fakta ini mempertegas betapa dalamnya ketergantungan investasi yang dialami Indonesia terhadap Singapura dalam konteks hubungan bilateral kedua negara.

Dinamika relasi yang asimetris ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka integrasi ekonomi regional yang lebih luas, yakni ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). AEC yang terwujud pada akhir tahun 2015 merupakan sebuah bentuk integrasi ekonomi yang bertujuan untuk menjamin kebebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta arus modal yang lebih bebas di antara negara-negara anggota ASEAN. Melalui AEC Blueprint 2025, ASEAN berupaya memperdalam integrasi tersebut dengan lima pilar utama yang saling memperkuat, termasuk di dalamnya tujuan pemerataan pembangunan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antar-anggota [16]. Akan tetapi, ambisi normatif AEC ini justru berhadapan dengan realitas struktural yang kompleks di tingkat bilateral.

Persoalannya adalah bahwa liberalisasi investasi yang didorong oleh AEC tidak serta merta menghasilkan distribusi manfaat yang merata di antara negara-negara anggota. Kesenjangan ekonomi domestik di antara negara-negara anggota ASEAN tetap substansial meskipun AEC telah diimplementasikan, dan dalam beberapa kasus justru melebar akibat arus FDI yang terkonsentrasi di kawasan-kawasan dengan tingkat pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kapasitas absorptif yang lebih tinggi [25]. Pola konsentrasi ini pada akhirnya memperkuat dominasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar kesenjangan pembangunan antara daerah inti dan pinggiran. Dalam konteks hubungan Indonesia-Singapura, kondisi ini termanifestasi dalam bentuk ketergantungan Indonesia pada modal dan teknologi Singapura, sementara Singapura pada gilirannya membutuhkan pasar dan sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Di sisi lain, di balik selimut kerja sama ekonomi bilateral yang tampak harmonis, terdapat rivalitas kepentingan yang bersifat struktural. Singapura, sebagai gateway investasi sekaligus pusat keuangan kawasan, sering kali dipandang sebagai pihak yang lebih diuntungkan dalam arsitektur integrasi ASEAN, terutama mengingat keunggulan komparatifnya yang jauh melampaui sebagian besar negara anggota lainnya. Kesenjangan ini terlihat nyata dalam data PDB per kapita yang dimana PDB per kapita Singapura berdasarkan Purchasing Power Parity mencapai 148.196 dolar AS, sementara PDB per kapita Indonesia hanya berada di kisaran 16.540 dolar AS, yang berarti terdapat perbedaan lebih dari sembilan kali lipat di antara keduanya

[4]. Kesenjangan kapasitas yang demikian besar inilah yang menjadikan AEC bukan sekadar arena kerja sama, melainkan juga arena kompetisi kepentingan antar-anggota.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara kritis dinamika relasi ekonomi Indonesia-Singapura dalam kerangka AEC, dengan fokus pada tiga pertanyaan utama, yaitu: pertama, bagaimana pola ketergantungan investasi Indonesia terhadap Singapura terbentuk dan berkembang? Kedua, bagaimana kerangka AEC membentuk dan memengaruhi relasi asimetris tersebut? Dan ketiga, bagaimana rivalitas kepentingan struktural di antara keduanya beroperasi di balik narasi kerja sama bilateral? Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi analitis terhadap pemahaman yang lebih kritis mengenai dinamika integrasi ekonomi ASEAN, khususnya dalam relasi bilateral antar-anggota yang memiliki kapasitas ekonomi yang sangat berbeda.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Ketergantungan (Dependency Theory)

Landasan teoritis pertama yang digunakan dalam artikel ini adalah teori ketergantungan (*dependency theory*), yang menawarkan kerangka analitis untuk memahami relasi asimetris antara negara maju dan negara berkembang dalam sistem ekonomi global. Teori ini memandang bahwa struktur ekonomi dunia terbagi antara negara-negara "inti" (*core*) yang mendominasi dan negara-negara "pinggiran" (*periphery*) yang bergantung, di mana integrasi ekonomi antara keduanya tidak menghasilkan pemerataan manfaat, melainkan justru melanggengkan ketimpangan struktural. Özekin (2023) menunjukkan bahwa studi-studi terkini membuktikan bentuk-bentuk ketergantungan baru telah direproduksi secara spasial melalui rantai nilai global yang terstruktur secara hierarkis, melibatkan interaksi antara perusahaan multinasional, negara, dan kelas sosial, sehingga menegaskan bahwa relevansi teori ketergantungan tidak berkurang meskipun lanskap globalisasi telah berubah.

Dalam konteks hubungan Indonesia-Singapura, kerangka teori ketergantungan relevan untuk menjelaskan posisi Indonesia sebagai negara penerima modal (*capital recipient*) yang secara struktural bergantung pada arus investasi dari Singapura sebagai negara pengirim modal (*capital exporter*). [18] memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa investasi langsung asing dari perusahaan multinasional ke negara-negara berkembang memang memberikan akses terhadap modal dan teknologi, namun hubungan tersebut bersifat transformatif hanya ketika negara penerima memiliki kapasitas dan otoritas yang cukup untuk bernegosiasi secara strategis dengan pihak multinasional dan modal domestik. Kondisi ini mencerminkan dilema yang dihadapi Indonesia dalam mengelola relasi investasinya dengan Singapura, yakni antara kebutuhan terhadap modal asing di satu sisi dan risiko ketergantungan struktural di sisi lain.

2.2. Interdependensi Kompleks dan Asimetri Kekuasaan

Kerangka teoritis kedua adalah konsep interdependensi kompleks (*complex interdependence*) yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye. Dalam karya mereka, Keohane dan Nye berargumen bahwa saling ketergantungan antar-negara tidak selalu bersifat simetris, dan bahwa asimetri dalam ketergantungan merupakan sumber kekuasaan dalam hubungan internasional. [12] menjelaskan bahwa pihak yang lebih sedikit bergantung dalam sebuah relasi dapat menggunakan posisinya sebagai *leverage* politik terhadap mitranya, baik secara bilateral maupun dalam upaya membentuk institusi internasional agar menguntungkan kepentingannya. Konsep ini secara langsung relevan untuk memahami bagaimana Singapura, meskipun secara fisik jauh lebih kecil dari Indonesia, mampu mempertahankan posisi tawar yang kuat dalam relasi bilateral berkat dominasinya sebagai sumber investasi.

Dalam relasi Indonesia-Singapura, terdapat dua dimensi ketergantungan yang perlu dibedakan. Pertama adalah dimensi *sensitivity* (kepekaan), yakni seberapa cepat perubahan kebijakan di satu negara memengaruhi negara lain. Kedua adalah dimensi *vulnerability* (kerentanan), yakni seberapa mahal biaya yang harus ditanggung suatu negara jika hubungan ketergantungan itu terputus. Indonesia berada pada posisi yang lebih *vulnerable* karena sangat bergantung pada aliran FDI Singapura untuk mendorong pertumbuhan investasi domestiknya, sementara Singapura memiliki diversifikasi tujuan investasi yang lebih luas sehingga relatif lebih tahan terhadap gangguan dalam hubungan bilateral ini. Kerangka analitis ini memungkinkan pemahaman yang lebih bernuansa mengenai di mana sesungguhnya kekuasaan struktural dalam relasi kedua negara beroperasi.

2.3. ASEAN Economic Community dan Dinamika Integrasi Regional

Kerangka teoritis ketiga berkaitan dengan regionalisme ekonomi dan integrasi kawasan, khususnya dalam konteks AEC. Ishikawa (2021) menegaskan bahwa AEC merupakan bentuk integrasi ekonomi paling maju di Asia Tenggara yang mencakup liberalisasi arus barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal, serta upaya untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antar-anggota. Namun demikian, evaluasi terhadap implementasi AEC menunjukkan hasil yang beragam. Di satu sisi, AEC berhasil mendorong penghapusan tarif dan peningkatan perdagangan intra-kawasan. Di sisi lain, liberalisasi di sektor jasa dan investasi masih menghadapi hambatan yang signifikan, dan kesenjangan antar-anggota dalam banyak kasus justru semakin melebar.

Persoalan kesenjangan dalam AEC ini dipertegas oleh sejumlah studi empiris. [6] menemukan bahwa arus FDI di negara-negara Asia justru memperburuk ketimpangan pendapatan ketika kualitas institusi negara penerima masih lemah, mengingat manfaat investasi cenderung dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi dan terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang sudah berkembang. Senada dengan itu, [29] juga mengonfirmasi bahwa FDI dan pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan di kawasan Asia selama periode yang mereka teliti, yang mengindikasikan bahwa liberalisasi investasi tanpa intervensi kebijakan yang memadai berpotensi memperlebar jurang antara negara dan kawasan inti dengan yang lebih tertinggal.

Dalam konteks ini, AEC tidak beroperasi sebagai mekanisme pemerataan yang netral, melainkan sebagai arena di mana negara dengan kapasitas ekonomi lebih besar seperti Singapura cenderung mendapatkan manfaat yang lebih besar dari liberalisasi investasi dibandingkan negara-negara dengan kapasitas lebih rendah. [15] juga menambahkan bahwa proses pendalaman integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global turut membawa risiko berupa meningkatnya kerentanan anggota yang lebih lemah terhadap guncangan eksternal.

2.4. Studi Terdahulu tentang Relasi Ekonomi Indonesia-Singapura

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji dimensi-dimensi tertentu dari relasi ekonomi Indonesia-Singapura. Butar-butar et al. (2024) memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi kedua negara, mencatat bahwa volume perdagangan bilateral telah mencapai angka yang signifikan dan Singapura secara konsisten menjadi investor asing terbesar di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Studi ini meletakkan dasar faktual yang penting, namun belum secara mendalam menganalisis dimensi asimetris dan rivalitas kepentingan yang mendasari relasi tersebut dalam kerangka AEC.

Di sisi lain, kajian-kajian mengenai AEC sebagian besar masih berfokus pada level kawasan secara keseluruhan tanpa menganalisis secara spesifik bagaimana kerangka AEC membentuk dinamika relasi bilateral antar-anggota yang memiliki kapasitas ekonomi berbeda. Kekosongan analitis inilah yang berupaya diisi oleh artikel ini, yakni dengan mengintegrasikan perspektif teori ketergantungan, interdependensi asimetris, dan dinamika integrasi regional ke dalam satu kajian yang berfokus pada relasi bilateral Indonesia-Singapura sebagai studi kasus dalam konteks AEC.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) sebagai metode utamanya. Pilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada sifat pertanyaan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dinamika, struktur, dan mekanisme relasi ekonomi antara Indonesia dan Singapura dalam konteks AEC, yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata. Sebagaimana ditegaskan oleh Odell (2001), metode studi kasus dalam kajian ekonomi politik internasional menawarkan sejumlah keunggulan inherent... dibandingkan metode statistik, khususnya dalam kemampuannya untuk membangun teori, mengidentifikasi mekanisme kausal yang kompleks, dan menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan kaya makna mengenai hubungan antar-variabel. Lebih lanjut, [14] menegaskan bahwa pendekatan studi kasus dalam kajian hubungan internasional memungkinkan peneliti untuk membangun kasus melalui interaksi dinamis dengan teori, sehingga pengetahuan yang dihasilkan bersifat lebih mendalam dan relevan secara analitis.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah relasi ekonomi bilateral antara Indonesia dan Singapura, yang dikaji dalam kerangka institusional AEC. Pemilihan relasi Indonesia-Singapura sebagai kasus didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kedua negara menghadirkan kontras paling mencolok dalam hal kapasitas ekonomi di antara seluruh anggota ASEAN, menjadikannya kasus yang paling relevan untuk mengkaji dampak liberalisasi investasi dalam konteks asimetri struktural. Kedua, Singapura merupakan satu-satunya

negara yang secara konsisten menduduki posisi sebagai investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade, sehingga hubungan keduanya menawarkan data longitudinal yang memadai untuk analisis pola dan tren. Ketiga, relasi kedua negara mencerminkan tegangan antara kerja sama formal dalam kerangka AEC di satu sisi dan persaingan kepentingan struktural di sisi lain, menjadikannya kasus yang representatif untuk mengkaji batas-batas integrasi ekonomi kawasan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan mencakup empat kategori utama. Pertama, data statistik investasi dan perdagangan yang bersumber dari publikasi resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, laporan ASEAN Investment Report yang diterbitkan oleh ASEAN Secretariat, serta data dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Kedua, dokumen kebijakan dan perjanjian bilateral, termasuk AEC Blueprint 2025, Bilateral Investment Treaty Indonesia-Singapura, serta berbagai Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani dalam forum Leaders' Retreat bilateral kedua negara. Ketiga, jurnal-jurnal ilmiah bereputasi internasional dalam bidang hubungan internasional, ekonomi politik internasional, dan studi kawasan ASEAN. Keempat, laporan dan publikasi dari lembaga-lembaga internasional terpercaya seperti International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), dan Ministry of Foreign Affairs Singapura.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Asimetri Struktural Indonesia-Singapura

Titik awal pemahaman dinamika relasi ekonomi Indonesia-Singapura adalah mengakui bahwa kedua negara beroperasi dalam konteks kapasitas ekonomi yang secara mendasar berbeda.. Perbedaan ini tidak sekadar soal ukuran wilayah atau jumlah penduduk, melainkan menyangkut kualitas dan kedalaman struktur ekonomi, kapasitas institusional, dan posisi dalam hierarki ekonomi global, yang pada akhirnya menentukan posisi tawar masing-masing negara dalam setiap dimensi kerja sama maupun persaingan kepentingan di dalam kerangka AEC.

Singapura merupakan salah satu perekonomian paling kompetitif di dunia, menempati posisi teratas dalam berbagai indeks tata kelola ekonomi global. Keunggulan Singapura dibangun di atas tiga pilar utama, yakni kepastian hukum yang tinggi, infrastruktur keuangan dan logistik yang sangat efisien, serta posisi geografis strategis di jalur pelayaran tersibuk dunia [10]. Dalam rentang beberapa dekade, Singapura berhasil mentransformasi dirinya dari negara berkembang menjadi pusat keuangan, perdagangan, dan teknologi kelas dunia, tanpa bergantung pada sumber daya alam yang besar. Indonesia, sebaliknya, adalah ekonomi berbasis sumber daya alam dengan pasar domestik yang sangat besar, namun masih menghadapi tantangan struktural yang serius dalam hal efisiensi birokrasi, kualitas infrastruktur, dan kedalaman pasar modal.

Kesenjangan ini tergambar secara sangat jelas dalam data PDB per kapita yang disajikan pada ¹. Selama satu dekade penerapan AEC (2015-2024), rasio PDB per kapita Singapura terhadap Indonesia tidak pernah turun di bawah angka 15 kali lipat, bahkan pada tahun 2024 melonjak menjadi lebih dari 20 kali lipat. Dengan kata lain, pendapatan rata-rata warga Singapura setara dengan lebih dari dua puluh kali pendapatan rata-rata warga Indonesia. Fakta ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari akumulasi perbedaan produktivitas, akses teknologi, kualitas pendidikan, dan efisiensi kelembagaan yang terbentuk selama puluhan tahun.

Tabel 1. Perbandingan PDB Per Kapita Indonesia dan Singapura dalam Dolar AS Tahun 2015-2024

Tahun	Indonesia (USD)	Singapura (USD)	Rasio Singapura/Indonesia
2015	3.347	55.647	1:16,6
2016	3.605	55.244	1:15,3
2017	3.837	59.797	1:15,6
2018	3.894	65.640	1:16,9
2019	4.135	66.176	1:16,0
2020	3.854	60.739	1:15,8
2021	4.287	73.748	1:17,2
2022	4.731	82.808	1:17,5
2023	4.925	84.734	1:17,2
2024	4.368	88.447	1:20,3

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan berbagai sumber.

Yang lebih signifikan untuk dicermati adalah bahwa rasio kesenjangan ini, alih-alih menunjukkan tren penyempitan yang konsisten, justru mengalami pelebaran pada akhir periode yang dikaji. Pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 menekan kedua perekonomian secara bersamaan, PDB per kapita Indonesia turun dari 4.135 dolar AS menjadi 3.854 dolar AS, sementara Singapura turun dari 66.176 dolar AS menjadi 60.739 dolar AS. Namun, pemulihan pascapandemi Singapura jauh lebih cepat dan lebih kuat, dengan PDB per kapita melonjak ke 73.748 dolar AS pada 2021 dan terus meningkat hingga 88.447 dolar AS pada 2024. Sementara itu, Indonesia baru berhasil melampaui level prapandemi secara konsisten mulai tahun 2021, dan bahkan mengalami penurunan nominal kembali pada 2024 akibat pelemahan nilai tukar rupiah [26].

Pola ini memperlihatkan bahwa kemampuan resiliensi ekonomi Singapura jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yang juga berdampak langsung pada kapasitas kedua negara dalam mengelola kepentingannya di dalam arsitektur AEC. Negara yang lebih resilien secara ekonomi memiliki ruang manuver kebijakan yang lebih luas, termasuk kemampuan untuk memberikan insentif investasi, melakukan negosiasi bilateral, dan memposisikan diri sebagai aktor dominan dalam rantai nilai kawasan [30]. Dalam perspektif Keohane, kondisi ini secara langsung menciptakan asimetri *vulnerability* yang menguntungkan Singapura dalam setiap dimensi relasi bilateral [12].

Yang penting untuk ditekankan di sini adalah bahwa asimetri struktural ini bukan merupakan konsekuensi dari AEC itu sendiri, melainkan merupakan kondisi pra-AEC yang kemudian berinteraksi dengan mekanisme liberalisasi AEC dan menghasilkan dinamika yang semakin kompleks. AEC bukan menciptakan asimetri, tetapi juga tidak berhasil mengoreksinya dalam beberapa aspek, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, justru memperkuat pola yang sudah ada [22].

4.2. Dominasi FDI Singapura di Indonesia

Manifestasi paling konkret dan terukur dari relasi asimetris Indonesia-Singapura adalah dominasi Singapura sebagai sumber utama investasi langsung asing di Indonesia yang konsisten dan semakin menguat sepanjang satu dekade terakhir [31]. Pada tahun 2015, yang bertepatan dengan lahirnya AEC secara resmi, Singapura telah menjadi investor asing terkemuka di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 5,9 miliar dolar AS. Angka ini melampaui Malaysia, Jepang, Belanda, dan Korea Selatan yang menduduki posisi berikutnya.

Tabel 2. Realisasi FDI Singapura ke Indonesia dalam Miliar Dolar AS dan Pangsa Total FDI, Tahun 2015-2024de

Tahun	FDI Singapura (Miliar USD)	Total FDI Indonesia (Miliar USD)	Pangsa Singapura
2015	5,90	29,3	25%
2016	7,00	28,9	24%
2017	8,40	32,2	27%
2018	9,00	29,4	28%
2019	5,90	28,2	21%
2020	9,80	28,7	32%
2021	9,10	31,1	29%
2022	13,30	44,8	31%
2023	15,40	47,3	33%
2024	20,10	60,6	52%

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan berbagai sumber.

Data pada Tabel 2 memperlihatkan dua tren yang saling memperkuat. Pertama, nilai absolut FDI Singapura ke Indonesia tumbuh secara dramatis, dari 5,9 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 20,1 miliar dolar AS pada 2024, atau meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam satu dekade. Peningkatan ini terjadi secara akseleratif, dengan nilai FDI Singapura pada tahun 2024 meningkat 30,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari angka 15,4 miliar dolar AS, dan secara mengejutkan menyumbang 52,5 persen dari total realisasi FDI Indonesia pada tahun tersebut, mencerminkan intensifikasi ketergantungan yang signifikan dalam satu tahun saja.

Kedua, pangsa Singapura dalam total FDI Indonesia juga mengalami kenaikan yang kuat, dari kisaran 24-28 persen pada periode 2015-2018 menjadi 31-33 persen pada 2020-2023, dan melonjak drastis ke 52 persen pada tahun 2024. Lonjakan tersebut mengindikasikan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap Singapura bukan hanya bersifat absolut tetapi juga relatif, dalam arti Singapura semakin mendominasi bahkan ketika total FDI Indonesia sendiri juga meningkat [27]. Fakta bahwa dalam sepuluh tahun terakhir Singapura secara

Dominasi FDI Singapura dan Rivalitas Kepentingan Struktural dalam Relasi Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura di Bawah AEC (Rafli Zahran Siregar)

konsisten menempati posisi teratas sebagai investor terbesar di Indonesia, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Menteri Investasi Indonesia yang menunjukkan betapa strukturalnya pola ketergantungan ini, jauh melampaui sekadar fluktuasi pasar jangka pendek.

Dari sisi sektoral, pola investasi Singapura di Indonesia mengalami pergeseran signifikan yang mencerminkan evolusi kepentingan strategis kedua negara. Pada periode awal AEC (2015-2018), investasi Singapura cenderung terkonsentrasi di sektor properti komersial, jasa keuangan, dan manufaktur ringan yang berbasis di kawasan Jawa. Pada kuartal pertama 2018, Singapura tetap menjadi investor asing terbesar di Indonesia dengan nilai sekitar 2,6 miliar dolar AS hanya untuk satu kuartal tersebut, dan kepala BKPM saat itu mencatat bahwa banyak perusahaan Singapura yang berinvestasi di Indonesia sebenarnya merupakan anak perusahaan dari korporasi yang berpusat di Tiongkok atau India, mengindikasikan peran Singapura sebagai perantara modal kawasan.

Pergeseran paling signifikan terjadi pasca-2020, seiring dengan kebijakan hilirisasi mineral yang dijalankan secara agresif oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2025, Singapura merupakan investor utama dalam industri hilirisasi Indonesia dengan nilai 7,9 miliar dolar AS, jauh melampaui Hong Kong sebagai pesaing terdekatnya, yang mengindikasikan pergeseran investasi Singapura ke arah sektor industri bernilai tambah tinggi yang sejalan dengan agenda strategis Indonesia [2]. Kondisi ini sekilas tampak menguntungkan bagi Indonesia, namun perlu dibaca secara lebih kritis: keterlibatan Singapura dalam industri hilirisasi berarti bahwa sektor-sektor paling strategis dalam agenda pembangunan Indonesia semakin terhubung dengan kapital asing, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kedaulatan industri jangka panjang.

Distribusi geografis investasi Singapura di dalam wilayah Indonesia juga mencerminkan pola konsentrasi yang relevan secara analitis. Secara historis, investasi Singapura terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, serta di Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat pergeseran investasi ke wilayah-wilayah luar Jawa, terutama Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang kaya mineral, seiring dengan kebijakan hilirisasi nikel [3]. Pola ini konsisten dengan temuan Huynh bahwa FDI cenderung terkonsentrasi di wilayah yang sudah memiliki infrastruktur dan kapasitas absorptif yang lebih tinggi, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan antar-wilayah alih-alih mempersempitnya [6].

4.3. AEC sebagai Kerangka Integratif

Penerapan AEC secara resmi pada akhir 2015 membawa perubahan institusional penting dalam lanskap investasi bilateral Indonesia-Singapura. Melalui pilar utamanya **yaitu** Pasar Tunggal dan Basis Produksi, AEC menjamin liberalisasi arus investasi antar-anggota, yang secara teknis berarti bahwa investor Singapura mendapatkan akses yang lebih mudah, lebih transparan, dan lebih terlindungi secara hukum ke pasar Indonesia, dan sebaliknya [24]. Namun, sebagaimana yang akan diuraikan dalam bagian ini, manfaat dari liberalisasi tersebut tidak terdistribusi secara setara karena perbedaan kapasitas struktural yang telah dibahas sebelumnya.

Pada level formal, AEC memberikan kontribusi nyata terhadap relasi bilateral melalui beberapa mekanisme konkret. Kedua negara kini memiliki perjanjian investasi bilateral yang telah diperbarui dan mulai berlaku pada Maret 2021, memberikan investor dari masing-masing pihak akses ke perlindungan hukum yang lebih kuat dan jalur penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Kerangka hukum ini secara efektif menurunkan biaya transaksi dan ketidakpastian regulasi bagi investor Singapura, yang pada gilirannya mendorong peningkatan arus investasi sebagaimana tercermin dalam data Tabel 2. Dengan demikian, AEC berfungsi sebagai katalis yang secara struktural menguntungkan pihak yang lebih siap secara institusional untuk memanfaatkan liberalisasi, yakni Singapura.

Di luar aspek perlindungan investasi, AEC Blueprint 2025 juga menetapkan tujuan-tujuan ambisius di bidang liberalisasi jasa, harmonisasi standar produk, dan pengembangan infrastruktur digital kawasan. Meski AEC telah berhasil mendorong penghapusan tarif dan berbagai kemajuan dalam liberalisasi perdagangan, evaluasi implementasinya menunjukkan bahwa liberalisasi sektor jasa dan investasi masih menghadapi hambatan yang signifikan, dan terdapat penilaian yang menyebutkan bahwa kemajuan integrasi masih jauh tertinggal dibandingkan standar yang berlaku di Uni Eropa maupun NAFTA [28]. Dalam konteks hubungan Indonesia-Singapura, hambatan tersebut cenderung lebih berat bagi Indonesia yang memiliki kapasitas regulasi dan administrasi yang lebih terbatas.

Dari perspektif yang lebih kritis, AEC juga memperlihatkan apa yang dapat disebut sebagai paradoks liberalisasi, yaitu bahwa di satu sisi AEC mendorong prinsip *most-favoured-nation* dan non-diskriminasi yang secara teori memberikan akses setara bagi semua anggota. Di sisi lain, prinsip tersebut mengasumsikan bahwa semua anggota memiliki kemampuan yang setara untuk memanfaatkan liberalisasi, padahal kenyataannya justru jauh dari setara [13]. Negara dengan infrastruktur keuangan yang lebih maju, seperti Singapura, secara alami mampu mengoptimalkan liberalisasi investasi karena memiliki ekosistem pendukung yang sudah matang: pasar modal yang likuid, sistem perbankan yang terintegrasi secara global, dan tenaga kerja terampil yang memenuhi standar internasional.

Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan dalam beberapa dimensi yang menjadi prasyarat untuk memanfaatkan AEC secara optimal. Data IMF menunjukkan bahwa arus FDI dari Singapura menyumbang sekitar 20 persen dari total FDI yang masuk ke empat negara ASEAN lainnya pada tahun 2021, menjadikan Singapura sebagai sumber negara utama dalam lanskap investasi intra-ASEAN yang memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan kawasan. Pola ini mengindikasikan bahwa liberalisasi investasi dalam kerangka AEC lebih banyak menghasilkan arus investasi satu arah dari Singapura ke negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia, daripada menciptakan arus yang lebih seimbang ke berbagai arah [8].

Lebih jauh lagi, terdapat dimensi kelembagaan yang penting untuk dicermati. Salah satu pilar AEC yang paling sulit diimplementasikan adalah liberalisasi tenaga kerja terampil. Dalam relasi Indonesia-Singapura, liberalisasi ini menghadapi paradoks tersendiri: sementara Singapura secara relatif lebih mudah mengekspor modal ke Indonesia, Indonesia menghadapi hambatan struktural dalam mengekspor tenaga kerja terampilnya ke Singapura, baik karena keterbatasan kualifikasi formal maupun karena kebijakan imigrasi Singapura yang selektif. Akibatnya, liberalisasi AEC di bidang tenaga kerja justru menghasilkan arus tenaga kerja tidak terampil dari Indonesia ke Singapura dalam jumlah besar, sementara arus tenaga kerja terampil tetap didominasi oleh profesional dari negara-negara maju non-ASEAN [17].

Seluruh dinamika ini konsisten dengan argumen Ishikawa bahwa evaluasi atas AEC menghasilkan hasil yang beragam karena sementara kemajuan dalam liberalisasi tarif dapat dipuji, hambatan non-tarif dan liberalisasi sektor jasa masih menghadapi kesulitan yang signifikan, dan kesenjangan antar-anggota dalam banyak kasus justru semakin melebar [7]. Dalam konteks hubungan Indonesia-Singapura, hal ini mengkonfirmasi bahwa AEC belum menjadi mekanisme konvergensi yang efektif, melainkan lebih berfungsi sebagai kerangka yang memberi legitimasi dan perlindungan terhadap pola investasi asimetris yang sudah ada sebelumnya.

4.4. Rivalitas Kepentingan Struktural

Di balik narasi resmi kerja sama bilateral yang hangat dan saling menguntungkan, terdapat sejumlah konflik kepentingan yang bersifat struktural dan persisten. Konflik-konflik ini tidak selalu tampil sebagai pertentangan diplomatik terbuka, tetapi beroperasi secara diam-diam melalui mekanisme ekonomi, kebijakan fiskal, dan regulasi yang masing-masing negara terapkan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Pemahaman terhadap dimensi rivalitas ini penting untuk melengkapi narasi kerja sama yang selama ini mendominasi wacana publik mengenai hubungan Indonesia-Singapura [11].

Konflik kepentingan pertama dan paling fundamental adalah persaingan untuk menarik FDI regional. Singapura secara konsisten memposisikan diri sebagai *gateway* investasi ke kawasan ASEAN, memanfaatkan posisi geografisnya, reputasi hukum yang kuat, dan ekosistem bisnis yang matang untuk menjadi titik transit kapital sebelum masuk ke negara-negara ASEAN lainnya. Namun, kebijakan hilirisasi Indonesia yang semakin agresif sejak 2019 dan upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan investasi merupakan langkah strategis yang secara tidak langsung bersaing dengan peran intermediasi Singapura. Ketika Indonesia berhasil menarik investor asing secara langsung tanpa melalui ekosistem keuangan Singapura, hal itu mengurangi relevansi Singapura sebagai perantara. Persaingan ini menghadirkan insentif bagi Singapura untuk menjaga agar Indonesia tetap relatif bergantung pada infrastruktur keuangan dan logistiknya, sementara Indonesia memiliki kepentingan yang berlawanan untuk memperkuat kapasitas domestiknya [13].

Konflik kepentingan kedua berkaitan dengan isu *tax haven* dan pelarian modal (*capital flight*). Singapura dikenal sebagai salah satu pusat keuangan dengan rezim perpajakan yang sangat kompetitif, dengan tarif pajak korporasi yang jauh lebih rendah dari Indonesia dan berbagai insentif fiskal yang menarik bagi perusahaan multinasional. Situasi ini menciptakan insentif bagi konglomerat Indonesia untuk mendirikan *holding company* di Singapura sebagai *tax optimization structure*, yang pada gilirannya menggerus basis

pajak Indonesia. Hal ini menjadi dilematis karena Indonesia membutuhkan investasi dari Singapura untuk mendorong pertumbuhan, tetapi di sisi lain menghadapi kenyataan bahwa sebagian dari kekayaan yang semestinya dapat dipajaki di Indonesia justru mengalir dan "berlabuh" di Singapura. Studi mengenai hubungan bilateral kedua negara mencatat bahwa salah satu tantangan signifikan dalam relasi Indonesia-Singapura adalah peran Singapura sebagai tempat berlindung bagi para pelaku korupsi dan penghindaran pajak dari Indonesia, menciptakan ketegangan yang persisten dalam hubungan diplomatik kedua negara [11].

Konflik kepentingan ketiga berkaitan dengan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) sebagai laboratorium kerja sama bilateral yang mengandung tegangan inheren. Kawasan BBK secara historis dirancang sebagai zona ekonomi khusus yang memanfaatkan kedekatan geografis dengan Singapura untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi Indonesia, sementara Singapura mendapatkan akses ke tenaga kerja yang lebih murah dan lahan yang lebih luas. Namun dalam praktiknya, kawasan ini lebih banyak berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari ekosistem industri Singapura, dengan nilai tambah yang lebih besar mengalir ke Singapura dalam bentuk manajemen, teknologi, dan keuangan, sementara Indonesia menyumbangkan lahan dan tenaga kerja murah. Perkembangan terbaru dalam kerja sama bilateral mencakup pengembangan taman industri rendah karbon dan proyek energi terbarukan di kawasan Batam, yang juga mencerminkan evolusi dari kerja sama berbasis upah murah menuju kerja sama teknologi, meskipun distribusi nilai tambah dari kerja sama ini masih menjadi pertanyaan terbuka.

Konflik kepentingan keempat berkaitan dengan persaingan dalam ekonomi digital. Singapura telah lama mengukuhkan diri sebagai pusat teknologi dan *startup* kawasan, dengan ekosistem modal ventura yang dalam dan regulasi teknologi yang ramah inovasi. Indonesia, dengan populasi pengguna internet terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi digital yang tumbuh pesat, sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan ekosistem teknologinya sendiri. Namun, banyak *startup* teknologi Indonesia justru memilih untuk berdomisili secara legal di Singapura dan melantai di bursa Singapura, bukan di Indonesia, karena alasan kepastian hukum dan akses ke modal yang lebih baik. Kondisi ini menciptakan paradoks: Indonesia menjadi pasar terbesar bagi perusahaan teknologi yang secara yuridis adalah entitas Singapura, sehingga nilai lebih ekonomi dari pertumbuhan digital Indonesia dinikmati di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam perspektif [21], ini adalah contoh dari bagaimana bentuk-bentuk ketergantungan baru terus direproduksi melalui rantai nilai digital yang terstruktur secara hierarkis [21]. Kondisi ini menunjukkan bahwa bahkan di sektor yang tergolong baru sekalipun, pola ketergantungan struktural cenderung terulang kembali jika Indonesia tidak memiliki ekosistem kelembagaan yang kompetitif.

Tabel 3. Matriks Kepentingan dan Titik Ketegangan Indonesia-Singapura dalam Kerangka AEC

Dimensi Relasi	Kepentingan Indonesia	Kepentingan Singapura	Titik Ketegangan
Investasi Langsung	Menarik FDI berkualitas dengan transfer teknologi nyata	Mengamankan akses pasar dan sumber daya yang stabil dan menguntungkan	Nilai tambah vs. efisiensi biaya produksi
Intermediasi Keuangan	Memperkuat ekosistem keuangan domestik dan mengurangi ketergantungan	Mempertahankan peran sebagai hub keuangan kawasan yang tidak tergantikan	Persaingan peran intermediasi kapital ASEAN
Perpajakan dan Fiskal	Memperluas basis pajak domestik dan mencegah pelarian modal	Mempertahankan daya tarik rezim pajak kompetitif bagi korporasi global	Capital flight, erosi basis pajak, dan isu tax haven
Hukum dan Keamanan	Menerapkan perjanjian ekstradisi dan pemulihan aset secara efektif	Menjaga reputasi sebagai pusat keuangan yang netral dan transparan	Pengakuan hukum lintas batas dan perlindungan buronan ekonomi
Energi dan Lingkungan	Mengembangkan industri hilir energi terbarukan dengan nilai tambah domestik	Mengamankan pasokan energi bersih dari Indonesia untuk keperluan domestik	Distribusi nilai dalam rantai pasokan energi lintas batas
Ekonomi Digital	Membangun ekosistem digital lokal dan mempertahankan perusahaan teknologi	Menarik dan mempertahankan status sebagai hub teknologi ASEAN	Domisili hukum perusahaan teknologi dan arus pendapatan digital
Tenaga Kerja	Mendorong ekspor tenaga kerja terampil dan	Mempertahankan selektivitas imigrasi untuk	Hambatan arus tenaga kerja terampil

meningkatkan kualifikasi SDM	menjaga produktivitas ekonomi	dalam kerangka AEC
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------

Sumber: Diolah oleh penulis

Matriks pada Tabel 3 memperlihatkan secara sistematis bahwa setiap dimensi kerja sama bilateral menyimpan dimensi rivalitas yang tidak selalu terwadahi secara memadai oleh mekanisme AEC. AEC, dengan pendekatan konsensusnya yang khas (*ASEAN Way*) dan minimnya mekanisme redistribusi antar-anggota, tidak memiliki perangkat yang cukup untuk mengelola tegangan-tegangan struktural ini. Sebaliknya, AEC berfungsi lebih sebagai penyedia payung hukum yang mempermudah arus investasi dan perdagangan, tanpa secara aktif memperhatikan dimensi keadilan distribusional dalam relasi bilateral antar-anggota yang sangat asimetris.

4.5. Ketergantungan Investasi dalam Perspektif Teoritis

Pembahasan empiris sebelumnya kini perlu disintesis ke dalam perspektif teoritis yang lebih kohesif, untuk memahami secara lebih mendalam apakah relasi ekonomi Indonesia-Singapura lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan ketergantungan (*dependency*) ataukah ketergantungan timbal balik (*interdependence*), serta bagaimana AEC memediasi dinamika tersebut.

Bila menggunakan lensa teori ketergantungan, terdapat sejumlah argumen yang mendukung karakterisasi relasi ini sebagai ketergantungan yang asimetris [21]. Pertama, pola arus modal yang mengalir dari Singapura sebagai negara "inti" ke Indonesia sebagai negara "pinggiran" mencerminkan struktur klasik dalam teori ketergantungan. Kedua, Indonesia menyediakan sumber daya alam, tenaga kerja, dan pasar bagi kapital Singapura, sementara Singapura menyediakan manajemen, teknologi, dan akses ke jaringan keuangan global. Ketiga, nilai tambah yang lebih tinggi dalam rantai produksi cenderung diakumulasi di Singapura, sementara tahapan produksi yang lebih rendah berada di Indonesia. Keempat, ketergantungan investasi Indonesia terhadap Singapura yang terus menguat, sebagaimana tercermin dalam data Tabel 2, menunjukkan bahwa liberalisasi AEC tidak menghasilkan pemberdayaan struktural bagi Indonesia, melainkan justru memperdalam integrasi asimetris yang sudah ada.

Namun, lensa teori ketergantungan saja tidak cukup untuk menangkap seluruh kompleksitas relasi ini. Kerangka interdependensi kompleks dari Keohane dan Nye memberikan nuansa tambahan yang penting [12]. Secara faktual, Indonesia juga memiliki *leverage* struktural tertentu terhadap Singapura yang membuat ukuran pasar Indonesia menjadi sangat besar yang menjadikannya mitra dagang dan investasi yang tidak dapat diabaikan oleh Singapura, sumber daya alam dan energi yang dibutuhkan Singapura untuk ketahanan energinya, serta posisi geografis Indonesia yang mengendalikan jalur pelayaran strategis di Selat Malaka dan perairan sekitarnya. Dalam hal ini, Indonesia tidak sepenuhnya berada dalam posisi lemah, tetapi ia memiliki sumber daya strategis yang berharga bagi Singapura.

Yang lebih tepat adalah mengkarakterisasi relasi ini sebagai interdependensi yang asimetris (*asymmetric interdependence*), di mana kedua negara memang saling membutuhkan, namun tingkat ketergantungan yang dialami Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan Singapura. Seperti yang diargumentasikan oleh Keohane, dalam situasi asimetri ketergantungan, pihak yang lebih sedikit bergantung memiliki *leverage* politik yang lebih besar untuk membentuk aturan main dalam hubungan bilateral maupun dalam institusi multilateral [12]. Dalam kasus ini, Singapura berada dalam posisi yang lebih sedikit bergantung, karena memiliki diversifikasi pasar dan sumber investasi yang jauh lebih luas, sementara Indonesia menghadapi keterbatasan dalam menggantikan Singapura sebagai sumber FDI utamanya dalam jangka pendek.

Kondisi ini memiliki implikasi kebijakan yang penting. Selama Indonesia tidak berhasil memperkuat kapasitas institusionalnya untuk menegosiasikan syarat-syarat investasi yang lebih menguntungkan, diversifikasi sumber FDI yang lebih berimbang, dan membangun ekosistem keuangan domestik yang lebih dalam, pola ketergantungan investasi ini cenderung akan terus berlanjut bahkan meskipun kerangka AEC terus diperbarui dan diperdalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Naseemullah, transformasi relasi ketergantungan menjadi ketergantungan yang lebih seimbang hanya mungkin terjadi ketika negara penerima investasi memiliki kapasitas dan otoritas yang cukup untuk bernegosiasi secara strategis dengan para investor asing dan membentuk syarat-syarat partisipasi modal asing dalam ekonomi domestiknya [18].

Dalam konteks ini, kebijakan hilirisasi Indonesia yang mensyaratkan pengolahan mineral di dalam negeri sebelum diekspor merupakan langkah yang secara teoritis tepat karena menggunakan *resource leverage* yang

dimiliki Indonesia untuk memaksa perubahan dalam struktur relasi investasi. Kebijakan ini memang berhasil menarik investasi Singapura ke sektor hilirisasi, namun pertanyaannya adalah apakah investasi tersebut disertai dengan transfer teknologi dan penguatan kapasitas domestik yang nyata, ataukah tetap dalam kerangka di mana Indonesia menyediakan sumber daya dan infrastruktur sementara kendali teknologi dan manajerial tetap berada di tangan investor Singapura.

4.6. Implikasi bagi Posisi Indonesia dalam Arsitektur Ekonomi AEC

Pembahasan dari seluruh temuan empiris dan analisis teoritis yang telah dipaparkan menghasilkan sebuah gambaran yang kompleks dan bernuansa mengenai posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi AEC, khususnya dalam relasi bilateralnya dengan Singapura. Indonesia bukanlah aktor pasif yang tidak memiliki *agency* dalam relasi ini, namun kapasitasnya untuk mengubah struktur relasi yang ada menghadapi keterbatasan yang nyata dan sistematis.

Dari perspektif AEC secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan penerima FDI terbesar di ASEAN setelah Singapura, namun pangsa Indonesia dalam total FDI ASEAN masih relatif kecil dibandingkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Menteri Investasi Indonesia sendiri menegaskan bahwa Indonesia baru menyerap sekitar 14 persen dari total FDI yang masuk ke ASEAN, padahal Indonesia adalah ekonomi terbesar di kawasan, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang pertumbuhan yang sangat signifikan, namun juga mencerminkan adanya hambatan struktural yang menghalangi Indonesia untuk memaksimalkan potensinya sebagai tujuan investasi dalam kerangka AEC [19].

Hambatan-hambatan tersebut tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui kerangka AEC semata. Diperlukan reformasi struktural domestik yang mendalam, termasuk penguatan kepastian hukum investasi, peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan pendalaman pasar keuangan. [29] dalam penelitiannya mengenai dampak FDI terhadap ketimpangan di negara-negara Asia menemukan bahwa manfaat FDI dalam mengurangi ketimpangan hanya dapat terwujud secara signifikan ketika disertai dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang kuat [29]. Temuan ini relevan untuk konteks Indonesia, yaitu agar FDI Singapura benar-benar berkontribusi pada transformasi struktural ekonomi Indonesia dan bukan sekadar memperdalam pola ketergantungan, Indonesia perlu memastikan bahwa investasi tersebut disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, alih teknologi yang nyata, dan pengembangan industri pendukung domestik.

Dalam jangka menengah hingga panjang, upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam relasi bilateral dengan Singapura dan dalam arsitektur AEC yang lebih luas perlu diarahkan pada tiga strategi utama. Strategi pertama adalah diversifikasi sumber FDI, sehingga ketergantungan pada Singapura sebagai sumber investasi tunggal dapat dikurangi secara bertahap tanpa mengganggu iklim investasi. Strategi kedua adalah peningkatan daya tawar dalam negosiasi investasi, terutama melalui penerapan persyaratan nilai tambah lokal, kandungan domestik, dan transfer teknologi yang terukur dan dapat dikontrol. Strategi ketiga adalah penguatan kerangka kelembagaan domestik, yang meliputi efisiensi birokrasi, kepastian hukum, dan pengembangan pasar modal domestik, sehingga Indonesia secara bertahap mampu mengurangi ketergantungannya pada ekosistem keuangan Singapura untuk memobilisasi kapital investasi.

Kerangka AEC, dengan segala keterbatasannya, tetap merupakan arena yang relevan bagi Indonesia untuk memperjuangkan reformasi mekanisme yang lebih berkeadilan. Dorongan untuk memperkuat pilar ketiga AEC, yakni Pembangunan Ekonomi yang Merata dan Inklusif, melalui mekanisme yang lebih konkret dan mengikat merupakan salah satu agenda yang dapat Indonesia perjuangkan dalam forum ASEAN. Tanpa perhatian yang lebih serius terhadap dimensi distribusi manfaat dalam integrasi kawasan, AEC berisiko menjadi kerangka yang secara normatif mengklaim kesetaraan namun secara struktural melanggengkan hierarki ekonomi yang sudah ada pada sebuah kondisi yang tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga mengancam legitimasi jangka panjang dari proyek integrasi kawasan itu sendiri [1].

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa relasi ekonomi Indonesia-Singapura dalam kerangka AEC bersifat interdependensi asimetris, di mana kedua negara memang saling membutuhkan, namun tingkat ketergantungan Indonesia jauh lebih dalam dibandingkan Singapura. Asimetri struktural yang tercermin dari rasio kesenjangan PDB per kapita yang melebar hingga 20,3 kali lipat pada tahun 2024, serta dominasi FDI Singapura yang tumbuh dari 5,9 miliar dolar AS menjadi 20,1 miliar dolar AS dalam satu dekade, mempertegas bahwa pola ketergantungan investasi ini bersifat struktural dan semakin

menguat seiring berjalannya AEC. Alih-alih menjadi mekanisme konvergensi ekonomi yang efektif, AEC justru beroperasi sebagai katalis yang memperkuat pola investasi asimetris yang sudah ada sebelumnya, karena liberalisasi yang bersifat formal-prosedural tidak disertai mekanisme redistribusi yang memadai untuk mengoreksi ketimpangan kapasitas antar-anggota. Di balik narasi kerja sama bilateral yang tampak harmonis, terdapat lapisan-lapisan rivalitas kepentingan yang persisten, mencakup persaingan menarik FDI regional, ketegangan seputar isu perpajakan dan pelarian modal, ketimpangan distribusi nilai tambah di kawasan ekonomi perbatasan, hingga perebutan posisi dalam ekosistem digital kawasan, yang keseluruhannya tidak dapat diakomodasi secara memadai oleh pendekatan konsensus AEC yang minim mekanisme koreksi struktural.

Temuan-temuan ini membawa implikasi kebijakan yang mendesak bagi Indonesia, sebagai berikut. Dalam jangka pendek, Indonesia perlu memperkuat implementasi persyaratan kandungan lokal dan transfer teknologi dalam setiap perjanjian investasi dengan Singapura agar FDI yang masuk benar-benar berkontribusi pada penguatan kapasitas industri domestik. Dalam jangka menengah, diversifikasi sumber FDI perlu diprioritaskan agar ketergantungan pada satu sumber tunggal dapat dikurangi secara bertahap. Dalam jangka panjang, pemerintah Indonesia perlu menyusun peta jalan diversifikasi FDI dengan target mengurangi pangsa investasi Singapura menjadi di bawah 40 persen dari total FDI dalam lima tahun ke depan, disertai strategi promosi investasi yang terarah ke Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Teluk.. Transformasi menuju relasi yang lebih seimbang pada akhirnya hanya akan terwujud apabila Indonesia mampu memanfaatkan *leverage* strukturalnya secara lebih strategis, baik berupa besarnya pasar domestik, kekayaan sumber daya alam, maupun posisi geografis yang vital, sebagai basis negosiasi yang lebih kuat dalam setiap forum bilateral maupun dalam arsitektur integrasi kawasan ASEAN yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. Alekhina and G. Ganelli, “Determinants of inclusive growth in ASEAN,” *Journal of the Asia Pacific Economy*, vol. 28, pp. 1196–1228, 2020, doi: 10.1080/13547860.2021.1981044.
- [2] A. Camba, G. Lim, and K. Gallagher, “Leading sector and dual economy: how Indonesia and Malaysia mobilised Chinese capital in mineral processing,” *Third World Quarterly*, vol. 43, pp. 2375–2395, 2022, doi: 10.1080/01436597.2022.2093180.
- [3] P. Fahik, A. Putri, and A. Raharyo, “Nickel Downstream and Indonesia’s Economic Diplomacy towards China,” *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 2024, doi: 10.31315/jsdk.v16i2.10799.
- [4] A. Fatiwetunusa, S. Syamsurijal, and S. Yuliana, “The Analysis of Income per Capita Convergence on ASEAN Plus Three (APT) Countries,” vol. 1, pp. 51–76, 2017, doi: 10.29259/sijdeb.v1i1.9.
- [5] L. Goh, I. Trinugroho, S. Law, and D. Rusdi, “Institutional quality, FDI inflows, human capital development and poverty: a case of Indonesia,” *International Journal of Social Economics*, 2024, doi: 10.1108/IJSE-09-2023-0733.
- [6] C. M. Huynh, “Foreign direct investment and income inequality: Does institutional quality matter?” *Journal of International Trade & Economic Development*, vol. 30, no. 8, pp. 1231–1243, 2021, doi: 10.1080/09638199.2021.1942164.
- [7] K. Ishikawa, “The ASEAN Economic Community and ASEAN economic integration,” *Journal of Contemporary East Asia Studies*, vol. 10, no. 1, pp. 24–41, 2021, doi: 10.1080/24761028.2021.1891702.
- [8] N. Ismail, P. Smith, and M. Kugler, “The Effect of ASEAN Economic Integration on Foreign Direct Investment,” *Journal of Economic Integration*, vol. 24, pp. 385–407, 2009, doi: 10.11130/jei.2009.24.3.385.
- [9] T. Ito, K. Iwata, C. McKenzie, and S. Urata, “Innovation in East Asia: Editors’ overview,” *Asian Economic Policy Review*, vol. 10, no. 1, pp. 1–18, 2015, doi: 10.1111/aepr.12096.
- [10] W. Jiao and Y. Wang, “Analysis of Logistics Spatial Layout and Networks between China and Ten ASEAN Countries,” in *Proceedings of the 2024 4th International Conference on Computational Modeling, Simulation and Data Analysis*, 2024, doi: 10.1145/3727993.3728028.
- [11] J. Karso, “Indonesia-Singapore Diplomatic Relations: Exploring Historical Ties, Economic Cooperation, Security, and Legal Challenges in All Aspects,” *International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews*, 2025, doi: 10.62951/ijhs.v2i3.450.
- [12] R. O. Keohane, “Joseph S. Nye Jr.: Complex interdependence, soft power, and effective policy action,” *International Organization*, vol. 79, no. 3, pp. 598–600, 2025, doi: 10.1017/S0020818325100830.
- [13] J. Kubny, F. Mölders, and P. Nunnenkamp, “Regional Integration and FDI in Emerging Markets,” 2008, doi: 10.4337/9781849809153.00019.

- [14] D. Lai and R. Roccu, "Case study research and critical IR: the case for the extended case methodology," *International Relations*, vol. 33, no. 1, pp. 67–87, 2019, doi: 10.1177/0047117818818243.
- [15] S. Lee, "ASEAN's economic security and regional economic cooperation: Past, present, and future," *Asian Journal of Comparative Politics*, vol. 7, no. 1, pp. 10–28, 2021, doi: 10.1177/20578911211032135.
- [16] J. Liang, "Diplomacy and International Cooperation in ASEAN: An analysis of politics, economy, and law in Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, and Singapore," *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, vol. 3, no. 11, pp. 5237–5259, 2024, doi: 10.59188/jcs.v3i11.2901.
- [17] K. Mukhopadhyay, "Implications of ASEAN economic integration on services: a global computable general equilibrium analysis," in *Skilled Labor Mobility and Migration*, 2019, doi: 10.4337/9781788116176.00011.
- [18] A. Naseemullah, "Dependent development in the twenty-first century," *Third World Quarterly*, vol. 43, no. 9, pp. 2225–2243, 2022, doi: 10.1080/01436597.2022.2089104.
- [19] D. Nurhayati, "Indonesia's Challenges and Strategies for the ASEAN Economic Community (AEC)," *Journal of Social Sciences and Humanities*, 2022, doi: 10.56943/jssh.v1i1.20.
- [20] J. S. Odell, "Case study Methods in International Political Economy," *International Studies Perspectives*, vol. 2, no. 2, pp. 161–176, 2001, doi: 10.1111/1528-3577.00047.
- [21] M. K. Özekin, "Revisiting dependency and development in the age of globalization," *New Global Studies*, vol. 18, no. 1, pp. 39–96, 2023, doi: 10.1515/ngs-2023-0015.
- [22] Y. Permatasari, "Build Indonesia through ASEAN Economic Community," vol. 8, pp. 81–93, 2020, doi: 10.21512/jas.v8i1.6040.
- [23] D. Setiawati and H. A. Hakim, "Indonesian Model of Foreign Direct Investment (Omnibus Law)," *FUNDAMENTAL Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 12, no. 1, pp. 82–102, 2023, doi: 10.34304/jf.v12i1.90.
- [24] K. Shimizu, "The ASEAN Economic Community and the RCEP in the world economy," *Journal of Contemporary East Asia Studies*, vol. 10, pp. 1–23, 2021, doi: 10.1080/24761028.2021.1907881.
- [25] S. Soekro and T. Widodo, *Mapping and Determinants of Intra-ASEAN Foreign Direct Investment (FDI): Indonesia Case Study, Working Papers WP/12/2015*, Bank Indonesia.
- [26] M. Ssenyonga, "Imperatives for post COVID-19 recovery of Indonesia's education, labor, and SME sectors," *Cogent Economics & Finance*, vol. 9, 2021, doi: 10.1080/23322039.2021.1911439.
- [27] B. Suryanta and A. Patunru, "Determinants of Foreign Direct Investment in Indonesia," *Global Journal of Emerging Market Economies*, vol. 15, pp. 109–131, 2022, doi: 10.1177/09749101211067856.
- [28] J. Witkowska, "Integration Processes in the Global Economy: Current State and Prospects. The Cases of the European Union, ASEAN Economic Community, and NAFTA," *Comparative Economic Research*, vol. 19, pp. 47–65, 2016, doi: 10.1515/cer-2016-0029.
- [29] M. Yuldashev, U. Khalikov, F. Nasriddinov, N. Ismailova, Z. Kuldashaeva, and M. Ahmad, "Impact of foreign direct investment on income inequality: Evidence from selected Asian economies," *PLoS ONE*, vol. 18, no. 2, p. e0281870, 2023, doi: 10.1371/journal.pone.0281870.
- [30] S. Zhou and Q. Feng, "Trade Policy Review of Singapore," *The World Economy*, 2023, doi: 10.1111/twec.13391.
- [31] I. Zuhroh and H. Harpiyansa, "Global Crisis and Economic Fundamentals: Its Impact on Foreign Direct Investment in ASEAN Countries," *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, vol. 17, no. 1, pp. 91–101, 2022, doi: 10.24269/ekulibrium.v17i1.2022.pp91-101.